



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2011-2015**

SKRIPSI

Radhika Deva Sari

1302025133

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2011-2015**

SKRIPSI

Radhika Deva Sari

1302025133

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2011-2015”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 3 Mei 2017

Yang menyatakan,



(Radhika Deva Sari)

NIM. 1302025133

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2011-2015

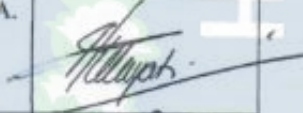
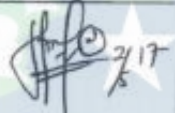
NAMA : RADHIKA DEVA SARI

NIM : 1302025133

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

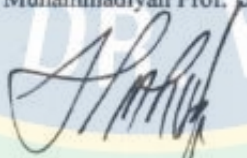
TAHUN AKADEMIK : 2017

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Dr. Hj. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA.	
Pembimbing II	Sumardi, S.E., M.Si.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Daram Heriansyah, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2011-2015

Yang disusun oleh :
Radhika Deva Sari
1302025133

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu (S1)
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 1 Desember 2017

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :




(H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., CA.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Sumardi, S.E., M.Si.)

Anggota :



(Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radhika Deva Sari
NIM : 1302025133
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2011-2015".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2017
Yang menyatakan,



(Radhika Deva Sari)
NIM. 1302025133

ABSTRAKSI

Radhika Deva Sari (1302025133)

“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2011-2015”

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Belanja Modal (BM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu memperoleh data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang berisi tentang jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sedangkan variabel Y adalah Belanja Modal (BM). Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji hipotesis (uji statistik t dan uji statistik F), analisis koefisien determinasi, dan analisis koefisien korelasi.

Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS *versi* 22.0 dan diperoleh persamaan regresi linear berganda $BM = 0,998 + 0,371 DAU + 0,306 PAD - 0,599 SILPA$ yang telah diuji kelayakan asumsi normalitas terdistribusi normal serta

tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif, maka model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,757 > t_{tabel} 2,02809$ dengan taraf signifikansi $0,001 < 0,05$. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,075 > t_{tabel} 2,02809$ dengan taraf signifikansi $0,004 < 0,05$. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dengan nilai t_{hitung} sebesar $-2,167 > t_{tabel}$ sebesar $-2,02809$ dengan taraf signifikansi $0,037 < 0,05$. Hasil uji F menunjukkan secara simultan ketiga variabel independen tersebut yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai uji $F_{hitung} 30,841 > F_{tabel} (2;37) = 3,25$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan analisis *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (BM), yaitu sebesar 69,7% dan sisanya 30,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran-saran kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan PAD dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber PAD untuk menambah penerimaan daerah agar dapat membiayai kebutuhan dan pengeluaran daerah sendiri serta diimbangi dengan peningkatan pembangunan daerah.

ABSTRACT

Radhika Deva Sari (1302025133)

“THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUND (DAU), LOCAL OWN REVENUE (PAD), AND SURPLUS BUDGET FINANCING (SILPA) TO CAPITAL EXPENDITURE IN THE DISTRICT AND THE CITY IN SOUTH SULAWESI PERIOD 2011-2015”

Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Keywords : General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), Surplus Budget Financing (SILPA), and Capital Expenditure (BM).

This study aims to determine the effect of General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), and Surplus Budget Financing (SILPA) to the Capital Expenditure in the district and the city in South Sulawesi Period 2011-2015.

This study uses secondary data, to obtain data in the form of the Budget Realization Report Revenue and Expenditure of the Audit Board of Indonesia (BPK-RI), which contains the amount of the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), Surplus Budget Financing (SILPA), and Capital Expenditure (BM) Regency/City in South Sulawesi. The variables studied were variable X namely the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), and Surplus Budget Financing (SILPA), while variable Y is a Capital Expenditure (BM). Data analysis and processing techniques used are accounting analysis, descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test), hypothesis testing (test t statistics and statistical test F), coefficient of determination analysis, and correlation coefficient analysis.

The results of data processing using SPSS version 22.0 and obtained by multiple linear regression equation $BM = 0,998 + 0,371 DAU + 0,306 PAD - 0,599 SILPA$ who have tested the feasibility of the assumptions of normality normally distributed and there will be multikolinearitas, did not happen heteroskedastisitas,

and no autocorrelation both positive and negative, then the regression model BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

The test results showed that the variables of the General Allocation Fund (DAU) positive and significant impact on the allocation of Capital Expenditure with value t_{count} of $3,757 > t_{table} 2,02809$ at a significance level of $0,001 < 0,05$. Variable Local Own Revenue (PAD) positive and significant impact on the allocation of Capital Expenditure with value $t_{count} 3,075 > t_{table} 2,02809$ with a significance level of $0,004 < 0,05$. Variable Surplus Budget Financing (SILPA) a significant negative effect on the allocation of Capital Expenditure with value t_{count} by $-2,167 > t_{table}$ by $-2,02809$ with a significance level of $0,037 < 0,05$. F test shows simultaneously three independent variables, namely the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), and Surplus Budget Financing (SILPA) significantly affects the Capital Expenditure to test value of $F 30,841 > F_{table} (2;37) = 3,25$ and a significance level of $0,000 < 0,05$.

Based on analysis of Adjusted R Square shows that the influence of the General Allocation Fund (DAU), Local Own Revenue (PAD), and Surplus Budget Financing (SILPA) of the Capital Expenditure (BM), which is 69,7% and the remaining 30,3% is explained by other variables not included in this study.

Based on the above research provides advice to local government in order to further increase revenue and optimize potential revenue sources to augment local revenues in order to finance their own regional needs and expenses as well as offset by an increase in regional development.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih kepada orang tua saya Ayahanda Agus Santoso, S.E., Ibunda Sri Widarti, S.E., M.M., beserta adik-adik Wanda Avia Pasha dan Ravi Rizky Fachrezy yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya selama penyusunan skripsi hingga selesai menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Dr. Hj. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Bambang Tutuko, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
10. Nurul Putri O., Novi Amalia, Merry Putri E., Eri Septiana, Nursyafira, Rima F. Ladiba, Zakiah, Iman Faizal, Hidayatullah, teman-teman A.G.U Fams, seluruh teman-teman kelas E Akuntansi FEB UHAMKA angkatan 2013, teman-teman lembaga KM FEB UHAMKA khususnya HIMA Akuntansi Periode 2014-2015 dan DPM FEB Periode 2015-2016, senior serta junior FEB UHAMKA angkatan 2012 s.d 2015 yang selalu mendukung untuk mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan.
11. Semua teman-teman remaja karang taruna 14 yang selalu mendukung untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pembaca sebagai sumbangan ilmiah bagi para pembaca, serta saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tercapainya penulisan yang lebih baik lagi. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 10 Mei 2017

Penulis



Radhika Deva Sari

NIM. 1302025133

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Telaah Pustaka	25
2.2.1 Pengertian Akuntansi	25
2.2.2 Akuntansi Sektor Publik.....	26
2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	26
2.2.2.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	27

2.2.2.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan.....	28
2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	29
2.2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	29
2.2.3.2 Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	29
2.2.3.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	30
2.2.4 Otonomi Daerah.....	31
2.2.4.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	31
2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	32
2.2.5 Laporan Keuangan Daerah	33
2.2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah	33
2.2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah.....	33
2.2.5.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan Daerah.....	35
2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)	36
2.2.6.1 Pengertian Dana Alokasi Umum	36
2.2.6.2 Alokasi Dana Alokasi Umum	37
2.2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	39
2.2.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	39
2.2.7.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	40
2.2.7.3 Penghitungan Pendapatan Asli Daerah	42
2.2.8 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	43
2.2.8.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	43
2.2.8.2 Penghitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	44
2.2.9 Belanja Modal.....	44
2.2.9.1 Pengertian Belanja Modal	44
2.2.9.2 Jenis-jenis Belanja Modal.....	45
2.2.9.3 Penghitungan Belanja Modal	47
2.2.9.4 Sumber Dana untuk Belanja Modal	47
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2.4 Rumusan Hipotesis.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	53

3.2	Operasionalisasi Variabel	53
3.3	Populasi dan Sampel	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	59
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	60
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
4.1.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	70
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	71
4.2.1	<i>Dana Alokasi Umum</i>	71
4.2.2	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	75
4.2.3	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</i>	79
4.2.4	<i>Belanja Modal</i>	83
4.2.5	<i>Analisis Akuntansi</i>	87
4.2.5.1	<i>Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</i>	87
4.2.5.2	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal</i>	90
4.2.5.3	<i>Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal</i>	94
4.2.5.4	<i>Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal</i>	97
4.2.6	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	101
4.2.7	<i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	102
4.2.8	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	104
4.2.9	<i>Uji Hipotesis</i>	111
4.2.10	<i>Analisis Koefisien Determinasi</i>	114
4.2.11	<i>Analisis Koefisien Korelasi</i>	115
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	118

BAB V PENUTUP

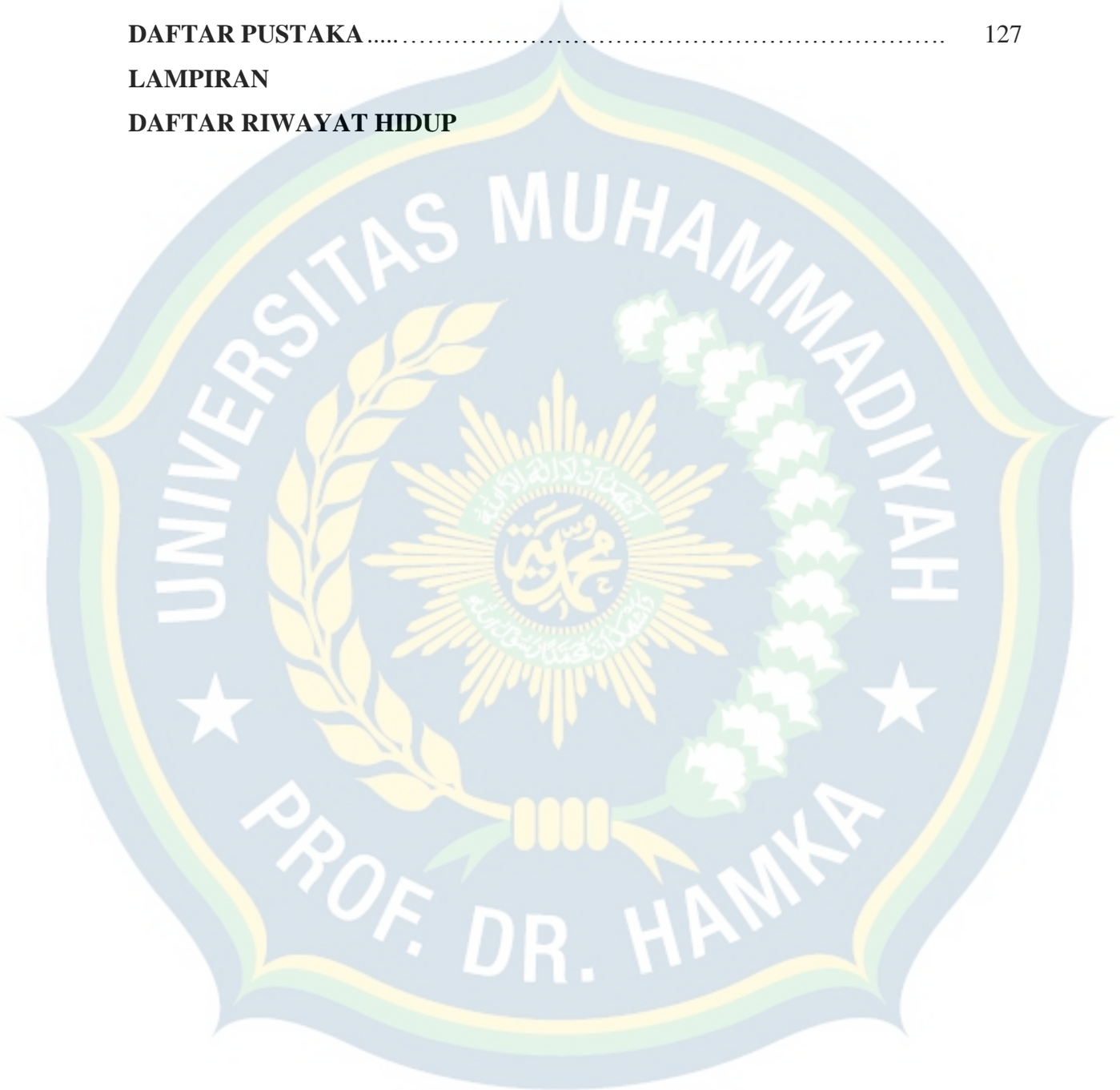
5.1 Kesimpulan..... 123

5.2 Saran-saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

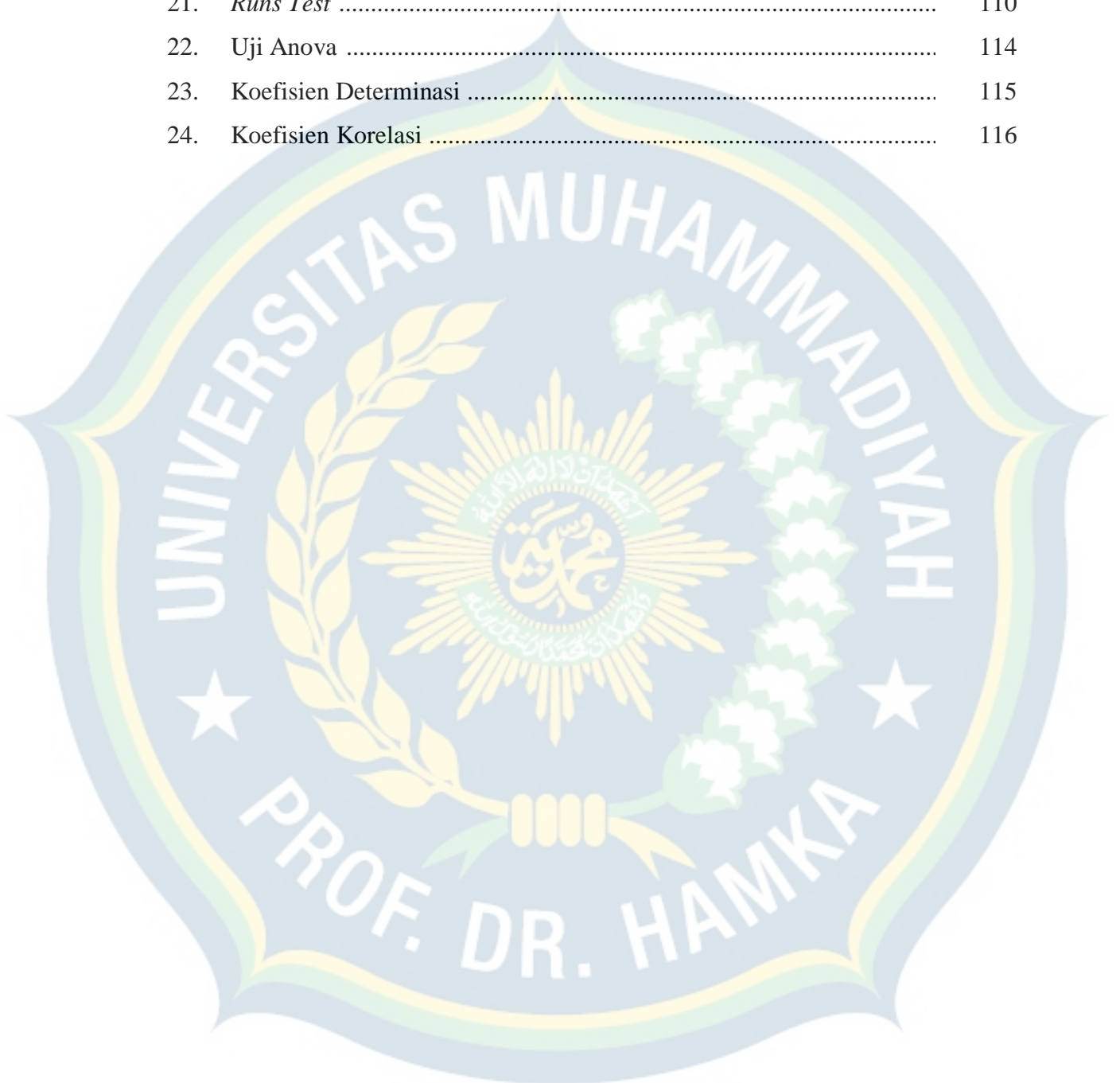
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

nomor	Judul	Halaman
1.	Data Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Sulsel Tahun 2011	7
2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
3.	Operasional Variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.....	54
4.	Populasi Penelitian Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.....	57
5.	Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang Menjadi Objek Penelitian	59
6.	Kriteria Autokorelasi <i>Durbin-Watson</i> (DW)	64
7.	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	67
8.	Dana Alokasi Umum Tahun 2011-2015	71
9.	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015	75
10.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2011-2015	79
11.	Belanja Modal Tahun 2011-2015	83
12.	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Tahun 2011-2015	88
13.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tahun 2011-2015	91
14.	Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Tahun 2011-2015	94
15.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal	98
16.	Statistik Deskriptif	101
17.	Uji Koefisien	103
18.	Uji Normalitas	106

19.	Uji Multikolinearitas	107
20.	Uji Autokorelasi	109
21.	<i>Runs Test</i>	110
22.	Uji Anova	114
23.	Koefisien Determinasi	115
24.	Koefisien Korelasi	116



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	51
2.	Grafik <i>Normal P-plot of Regression Standardized Residual</i>	105
3.	Grafik <i>Scatterplot</i>	108
4.	Daerah Pengujian <i>Durbin Watson</i>	109

DAFTAR LAMPIRAN

nomor	Judul	Halaman
1.	Tabel Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015	1/25
2.	Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015	3/25
3.	Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015	5/25
4.	Tabel Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015	7/25
5.	Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 22.0	9/25
6.	Tabel t	14/25
7.	Tabel F	15/25
8.	Tabel Durbin Watson	16/25
9.	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	17/25
10.	Formulir Permohonan Informasi Publik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	18/25
11.	Contoh Laporan Realisasi Anggaran Sulawesi Selatan	19/25
12.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	21/25
13.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	22/25
14.	Surat Tugas	23/25
15.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	24/25
16.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II	25/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan mempendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada kabupaten/kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pempus ke Pemda yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kemampuan daerah yang tercantum dalam APBD.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Dodik Siswantoro dan Kusnandar, 2012 : 2).

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik, dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran.

Belanja Modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. (Dodik Siswantoro dan Kusnandar, 2012 : 2). Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Kemudian, terdapat permasalahan yang muncul dari implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu,

adanya ketimpangan dan kesenjangan sumber daya dan potensi yang dimiliki antara daerah 1 (satu) dengan daerah yang lain. Nantinya akan memberikan dampak kecemburuan sosial dalam hal belanja daerah khususnya Belanja Modal.

Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan menurut UU 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu.

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk

pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah) dan Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda.

Penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. (Dodik Siswanto dan Kusnandar, 2012 : 3)

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan

pada tahun 2010 turun menjadi 73% (www.djpk.kemenkeu.go.id, 2011). DAU masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari DAU dan untuk provinsi sekitar 20%.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007 : 2)

Studi yang dilakukan oleh Dodik Siswantoro dan Kusnandar (2012 : 4) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap Belanja Modal, sementara PAD tidak. Sementara itu SILPA dalam hubungannya dengan Belanja Modal telah diteliti oleh Ardhini (2011 : 13) dengan objek penelitian di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pendanaan Belanja Modal.

Pemerintah Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan tahun 2011 selain mempertimbangkan hasil yang dicapai tahun sebelumnya, juga didasarkan pada dana yang ditransfer oleh Pempus, serta melihat pendapatan yang didapat oleh kabupaten dan kota masing-masing di Sulawesi Selatan tahun 2011. Pada tabel di bawah, maka Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan memiliki Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Belanja Modal (BM) yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Menurut Lampiran I Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pernyataan No. 01 PP No. 71 Tahun 2010, secara spesifik sumber dana untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya.

Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat untuk mendanai Belanja Daerah (Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Tersangka). Bisa didominasi sektor pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel, dan restoran masih menjadi tumpuan peningkatan perekonomian di Sulawesi Selatan. Pada dasarnya setiap daerah merencanakan anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya dengan tanpa sisa anggaran atau dengan perencanaan sisa anggaran yaitu Rp 0, namun pada realisasinya setiap daerah mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi anggaran APBD.

Berikut ini adalah data Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 yang didapat dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia) :

Tabel 1
Data Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011

Keterangan								
Kabupaten /Kota	Anggaran DAU	Realisasi DAU	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Anggaran SILPA	Realisasi SILPA	Anggaran BM	Realisasi BM
Jeneponto	355.798.390.000	355.584.155.000	16.285.472.200	12.109.087.629	0,00	7.453.025.745	177.714.306.550	137.513.136.345
Bone	622.119.055.000	622.119.055.000	60.437.507.664	34.414.657.470	0,00	54.809.143.960	231.065.008.222	132.147.722.411
Maros	358.603.014.000	358.404.892.000	52.470.780.729	46.998.588.485	0,00	12.080.729.036	158.935.498.359	125.212.982.211
Pangkajene dan Kepulauan	385.783.050.000	385.552.312.000	79.046.672.106	60.930.305.488	0,00	66.220.986.767	182.764.736.144	150.395.395.009
Enrekang	302.334.058.000	302.334.058.000	20.267.287.065	13.465.906.863	0,00	7.521.455.485	138.521.597.397	101.765.523.496
Gowa	470.558.694.000	470.558.694.000	73.771.176.907	83.221.491.180	0,00	111.644.659.709	167.056.806.176	141.259.906.468
Luwu	396.747.997.000	396.747.997.000	21.395.791.600	18.318.366.436	0,00	38.772.929.838	173.355.747.731	161.544.847.302
Makassar	718.481.339.000	718.481.320.000	345.335.311.000	351.692.552.588	0,00	161.878.052.384	249.921.210.258	168.523.776.058

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, data diolah oleh peneliti, 2017

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian dari Dodik Siswantoro dan Kusnandar (2012) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal”. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan obyek studi penelitian pada Kabupaten dan Kota di daerah Sulawesi Selatan periode 2011-2015 untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?

3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, pada periode 2011 sampai 2015. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih terarah.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah “Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik lembaga itu sendiri maupun pihak-pihak lain di luar lembaga. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk melihat kemampuan daerah mengelola sumber daya dan untuk digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyusun APBD.

2. Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan pentingnya dalam memahami mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan dan dapat mempraktikkan apa yang telah didapat dan dipelajari selama duduk di kursi kuliah terkait akuntansi sektor publik serta dapat menambah wawasan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi serta informasi yang dibutuhkan bagi dunia akademik dan memberikan gambaran serta penjelasan tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

4. Pembaca dan Masyarakat Luas

- 1) Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalokasian berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sebagai referensi dan bahan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, dan Wayan Karman. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Arbie Gugus Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012)*. Skripsi. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ardhini. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. "Laporan Hasil Pemeriksaan" (online). www.bpk.go.id. Diakses tanggal 29 Januari 2017.
- Berlian Nur Awanz. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan*. Skripsi. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- David Harianto dan Priyo Hari Adi. (2007). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Makassar : Simposium Nasional Akuntansi X Tahun 2007.
- Deddi Nordiawan. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. "Dana Perimbangan Keuangan" (online). www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 29 Januari 2017.
- Duwi Priyatno. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta : MediaKom.
- Dodik Siswanto dan Kusnandar. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas*

Wilayah terhadap Belanja Modal. Banjarmasin : Simposium Nasional Akuntansi XV Tahun 2012.

Fitria Megawati Sularno. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

HAW Widjaja. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Junaidi. 2017. "Tabel t, Tabel F, dan Tabel Durbin Watson".
<http://junaidichaniago.wordpress.com>. Download 7 Februari 2017 Jam 13.00 WIB.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Offset.

Mohamad Mahsun, Sulistyowati Firma, dan Purwanugraha. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPF.

Mutiah and Ratna Mappanyukki. (2015). *The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia)*. *Finance and Accounting International Research Journals* No. 9, Vol. 6, Page 14-21, April 2015. Jakarta : Universitas Mercu Buana.

Nugraeni. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* No. 9, Vol. 8, Hal. 96-117, Maret 2011. Yogyakarta : Universitas Mercu Buana.

Pelealu, Andreas M. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. *Jurnal EMBA* No. 4, Vol. 1, Hal 1189-1197, Desember 2013. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.

Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. "Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan". www.sulselprov.go.id. Download 5 Februari 2017 Jam 09.00 WIB.

Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Setia.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

_____. (2005). Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 PP No. 71 Tahun 2010.

_____. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

_____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2010). *Otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia : Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Simanjuntak, Lestari L. F., Ahmad Subeki, Ika Sasti Ferina, and Hasni Yusrianty. (2013). *Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income to Regional Expenditure of Districts and Cities in South Sumatera. Accounting International Research Journals No. 2, Vol. 3, Page 1-29, October 2013. Indonesia : Sriwijaya University.*

Singgih Santoso. (2012). *Aplikasi SPSS pada Statistika Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Subramanyam, K.R. dan Jhon J. Wild. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Buku 1 Edisi 10*. Penerjemah : Dewi Yanti. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tuasikal, Askam. (2008). *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* No. 2, Vol. 1, Hal. 142-155, Juli 2008. Ambon : Universitas Pattimu

